



KECAMATAN BENOWO

2024

PERUBAHAN RENCANA
KERJA

Pemerintah Kota Surabaya

Jalan Raya Kendung - Sememi no. 47

Telp. (031) 7402204 Fax. (031) 7402204

SURABAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	1
1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
1.2 Maksud dan Tujuan.....	6
1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	6
1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	7
1.3 Landasan Hukum.....	7
1.3.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.....	8
1.3.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	20
BAB IV PENUTUP.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kecamatan Benowo sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menyusun dokumen Renja PD Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut dan digambarkan pada diagram Gambar I.1

- 1 Persiapan Penyusunan Renja PD. Persiapan penyusunan renja meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- 2 Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renja PD
Perangkat Daerah menyusun Rankhir Renja PD paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:
 - a. Rencana Strategis (Renstra) PD;
Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu; dan
 - b. Hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan. Penyusunan Rankhir RenjaPD

Mencakup :

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
Hasil perumusan Rankhir Renja PD, disajikan dengan sistematisapaling

Sedikit memuat :

- a. Pendahuluan
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

3 Penyusunan Rancangan Renja PD

Penyusunan Rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja PD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renja PD. Rancangan Renja PD tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPENDA kabupaten /kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja PD dengan maksud dapat menjamin Rancangan Renja PD telah selaras dengan rancangan akhir RKPD.

4 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum

Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja PD. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan Rancangan Renja PD dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam beritaacara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

5 Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) Renja PD

Perumusan Rankhir Renja PD, merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja PD menjadi Rankhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rankhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rankhir Renja PD disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rankhir Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk disempurnakan dan disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA. Verifikasi seluruh Rankhir Renja PD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rankhir Renja PD.

6 Penetapan BAPPEDA

BAPPEDA menyampaikan seluruh Rankhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja PD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja PD yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Penyusunan Renja Kecamatan Benowo Tahun 2024 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Benowo yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

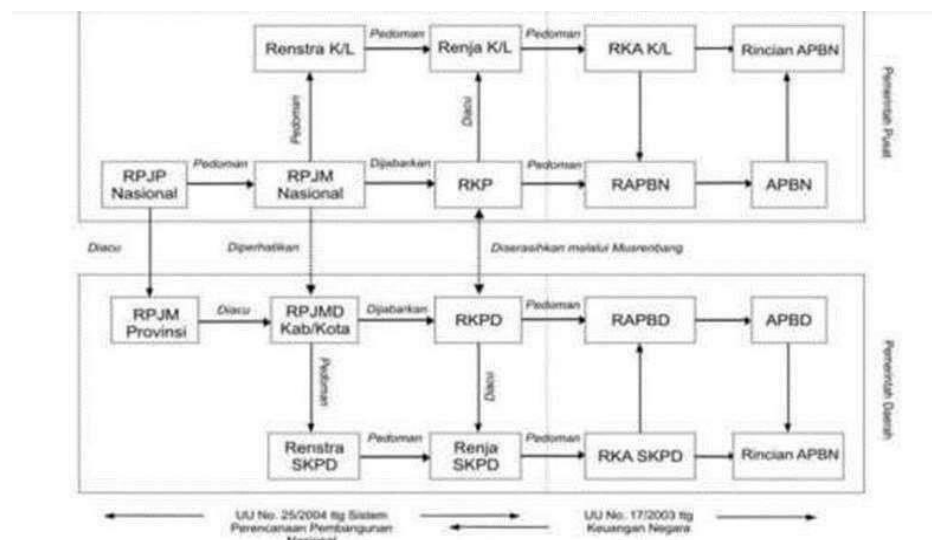
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Penyusunan Renja Kecamatan Benowo dari tahap dokumen Renja PD sampai dengan dokumen Renja PD dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Kecamatan benowo Tahun 2021-2026 serta Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024

Pada penyusunan Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

- a. Berpedoman pada Renstra PD, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja PD dengan Renstra PD.
- b. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra PD.

Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat ditunjukkan pada Gambar 2

Gambar 2 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Benowo Tahun 2024 disusun dengan maksud:

- 1 Menjabarkan rencana jangka pendek (1 tahun) untuk tahun 2024 pada Kecamatan Benowo

- 2 Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Benowo dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada dan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Benowo.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Benowo Tahun 2024 adalah:

- 1 Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Benowo dalam jangka waktu 1 tahun;
- 2 Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Benowo Tahun Anggaran 2024;
- 3 Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.3 Landasan Hukum

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310)
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

1.3.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Kecamatan Benowo mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam Pasal 7 Perwali No. 94 Tahun 2021, Kecamatan Benowo memiliki tugas :

- 1 Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
- 2 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 5 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6 Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- 7 Membina dan mengawasi kegiatan;
- 8 Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di Kecamatan;
- 9 Melaksanakan tugas - tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10 Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Benowo dalam melaksanakannya tugasnya, menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- 1 Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis;
- 2 Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis;
- 3 Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lainnya;
- 4 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- 5 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 6 Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Benowo dijelaskan dalam Gambar 3, sebagai berikut:

Gambar 3 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya



1.3.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
- 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;

- 11 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Benowo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan /atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap, berisikan uraian mengenai:

1. Membandingkan antara rencana kerja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rencana kerja RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rencana kerja RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 5.1 Program dan Kegiatan Pada bagian ini dijelaskan mengenai:
 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
 3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana kerja RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C33.
 - 5.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Kecamatan Benowo melaksanakan 5 (lima) program yang dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) kegiatan. Kecamatan mendukung program yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.1. sesuai dengan dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021- 2026.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Benowo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7		Unsur Kewilayahan																			
7.01		Kecamatan																			
7.01.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		16,507,701		21,589,635		19,176,699		4,352,749		10,103,266	-	-		14,456,015		36,045,650		218,36%
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.09 %		94.04 %		97.91 %		93.73 %		93.99 %		-	-		93.99 %		93.99 %		95.82%
7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15,615,151				16,462,971		3,751,005		8,760,962	-	-		12,511,967		12,511,967		80.13%
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %		100 %		100 %			-	-		100 %		100 %		100.00 %
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9,120,103				16,462.971		3,751.005		8,760.962	-	-		12,511.967		12,511.967		137,19%
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		56 Orang/bulan		55 Orang/bulan		55 Orang/bulan	-	-		55 Orang/bulan		55 Orang/bulan		N/A
7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		724,460				2,617,598		587,385		1,305,454	-	-		1,892,839		1,892,839		261.28%
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %		100 %		100 %		100 %			-	-		100 %		100 %		100.00 %
7.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,624,599				2,617.598		587.385		1,305.454	-	-		1,892.839		1,892.839		116,51%
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		17 Paket		12 Paket		12 Paket	-	-		12 Paket		12 Paket		N/A
7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		168,090				96,130		14,360		36,850	-	-		51,209		51,209		30.47%
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %		100 %		100 %		100 %			-	-		100 %		100 %		100.00 %
7.01.01.2.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		139,792				96,130		14,360		36,850	-	-		51,209		51,209		36,63%
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		5 Unit		1 Unit		2 Unit	-	-		2 Unit		2 Unit		N/A
7.01.02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		2,466,163		23,147		30,884		8,317		11,443	-	-		19,760		42,907		1,74%
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %	-	-		100.00 %		100.00 %		100.00%
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		0.00 %	-	-		0.00 %		0.00 %		0.00%
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45 %		40.99 %		34.45 %		26.12 %		26.12 %	-	-		26.12 %		26.12 %		75.82%
7.01.02.2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		5,427				5,192		5,190		5,190	-	-		10,380		10,380		191.28%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		-	-	6 lembaga		12 lembaga		200.00 %	
7.01.02.2.01.0001				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12,394			5.192			5.190		5.190	-	-		10.380		10.380		83.75%
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A		N/A		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		-	-	1 Laporan		1 Laporan		N/A	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			2,436,619			10,422			3,127		6,253	-	-		9,380		9,380		0.38%
					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga		193 lembaga		193 lembaga		193 lembaga		193 lembaga		-	-	193 lembaga		193 lembaga		102.66 %	
7.01.02.2.02.0003				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4,708,920			10,422			3,127		6,253	-	-		9,380		9,380		0.20%
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		N/A	
7.01.02.2.04				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			24,118			15,270			0		0	-	-		0		0		0.00%
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-	-	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %	
7.01.02.2.04.0003				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			13,399			7,692			0		0	-	-		0		0		0,00%
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		N/A	
7.01.02.2.04.0002				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10,049			5,088			0		0	-	-		0		0		0,00%
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		N/A	
7.01.02.2.04.0001				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1,675			2,489			0		0	-	-		0		0		0,00%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						N/A		N/A		15 Dokumen		4 Dokumen		8 Dokumen		-		-		8 Dokumen		8 Dokumen		N/A	
7.01.03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			12,180,435		8,238,640		11,371,600		418,667		2,436,069		-		-		2,854,736		11,093,376		91,08%
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
					Persentase keluhan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100 %		37.50 %		62.50 %		0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%	
7.01.03.2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12,065,320				11,273,644		416,027		2,405,746		-		-		2,821,773		2,821,773		23.39%
					Jumlah keluhan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		0 Kelurahan		1 Kelurahan		100.00 %	
					Jumlah keluhan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 keluhan		4 keluhan		4 keluhan		0 keluhan		0 keluhan		-		-		0 keluhan		0 keluhan		0.00 %	
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833				2,218,247		0		126,252		-		-		126,252		126,252		4,28%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		9 Unit		0 Unit		3 Unit		-		-		3 Unit		3 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833				2,153,298		0		401.707		-		-		401.707		401.707		13,63%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		3 Unit		0 Unit		4 Unit		-		-		4 Unit		4 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833				2,226,290		0		124.728		-		-		124.728		124.728		4,23%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		10 Unit		0 Unit		0 Unit		-		-		0 Unit		0 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833				1,102,347		0		619.601		-		-		619.601		619.601		21,02%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		4 Unit		0 Unit		2 Unit		-		-		2 Unit		2 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986,245				868,028		142,434		356,064		-		-		498,498		498,498		50,55%
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986,245				677,226		34,552		86,704		-		-		121,257		121,257		12,29%
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986,245				1,313,740		200,213		498,212		-		-		698,424		698,424		70,82%
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986,245				709,668		38,828		192,478		-		-		231,306		231,306		23,45%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						N/A		N/A		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		-	-	-	-	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0001					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		33,497			4.800		0		0		-	-	-	-	0		0		0,00%	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	N/A		N/A		9 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		-	-	-	-	0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		N/A	
7.01.03.2.03					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		115,115			97,956		2,640		30,323		-	-	-	-	32,963		32,963		28.63%	
					Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha		50 Potensi usaha		50 Potensi usaha		12 Potensi usaha		24 Potensi usaha		-	-	-	-	24 Potensi usaha		74 Potensi usaha		148.00 %	
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga		26 Lembaga		26 Lembaga		0 Lembaga		26 Lembaga		-	-	-	-	26 Lembaga		26 Lembaga		100.00 %	
7.01.03.2.03.0004					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		31,822			15.705		2.640		6.600		-	-	-	-	9.240		9.240		29.04%	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	-	-	6 Laporan		6 Laporan		N/A	
7.01.03.2.03.0003					Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		142,820			82.251		0		23.723		-	-	-	-	23.723		23.723		16.61%	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	N/A		N/A		26 Unit		0 Unit		26 Unit		-	-	-	-	26 Unit		26 Unit		N/A	
7.01.04					Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		117,273		242,232		149,067		24,868		63,282		-	-	-	88,150		330,382		281,72%	
					Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-	-	-	-	100.00 %		100.00 %		100.00%	
7.01.04.2.01					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		117,273			149,067		24,868		63,282		-	-	-	-	88,150		88,150		75.17%	
					Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		-	-	-	-	14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %	
7.01.04.2.01.0001					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		309,309			149.067		24.868		63.282		-	-	-	-	88.150		88.150		28,50%	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	-	-	6 Laporan		6 Laporan		N/A	
7.01.05					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		32,827		14,668		24,665		2,504		6,260		-	-	-	8,764		23,432		71,38%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
					Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-	-		100.00 %		100.00 %		100.00%		
7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			32,827			24,665		2,504		6,260		-	-		8,764		8,764		26.70%		
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-	-		0 Topik		2 Topik		100.00 %		
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		12 Kasus		-	-		12 Kasus		36 Kasus		150.00 %		
7.01.05.2.01.0002				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16,749			8,960		0		0		-	-		0		0		0,00%		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A		N/A		12 Orang		0 Orang		0 Orang		-	-		0 Orang		0 Orang		N/A		
7.01.05.2.01.0005				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8,039			15.705		2.504		6.260		-	-		8.764		8.764		109,01%		
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-		6 Laporan		6 Laporan		N/A		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan programprogram RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Benowo Kota Surabaya adalah Visi dan Misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturanperaturan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Untuk mewujudkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Benowo Kota Surabaya didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Benowo tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan maupun sub kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Perubahan Renja Kecamatan Benowo Tahun 2024 dirumuskan dalam 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Benowo pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 tidak mengalami perubahan output maupun anggaran. Rancangan Perubahan Renja Benowo tahun 2024 tetap akan melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Benowo Kota Surabaya menyusun Program dan kegiatan untuk tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki indikator persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dengan target capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 97.91 %. Adapun kegiatan ini pada tahun 2024 yang menjadi penunjang program ini adalah

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Kinerja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN nilai total pagu Rp. 16.462.970.968,- dan setelah perubahan total pagu menjadi Rp. 17.474.232.068,-
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki indikator kinerja Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan memiliki nilai total pagu Rp. 2.617.598.309,- dan setelah perubahan total pagu menjadi Rp. 3.009.576.576,-
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja program persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diperlihara dan memiliki pagu kegiatan Rp. 96.130.000,- dan setelah perubahan total pagu menjadi Rp. 101.275.087,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki 3 indikator program, yaitu persentase data tervirifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah memiliki target kinerja 100 %; Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat memiliki target kinerja 100 %; dan persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan memiliki target kinerja 34.45%. Adapun pada program ini memiliki 3 kegiatan, yaitu :

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan dengan sub kegiatan koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal

terkait, memiliki indikator jumlah laporan koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait dengan target capaian 1 Laporan serta pagu kegiatan Rp. 5.192.424,-

- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, memiliki sub. Kegiatan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, memiliki indikator Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dengan target capaian 12 Laporan serta pagu sebesar Rp. 10.422.000,- dan setelah perubahan total pagu menjadi Rp. 12.506.400,-
- c. Sedangkan kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat ini memiliki 3 sub kegiatan, antara lain :
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha, memiliki indikator jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan dengan target 15 dokumen dan pagu sebesar Rp. 2.489.175,- dan tidak mengalami perubahan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan, memiliki indikator jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan dengan target 12 Laporan pagu sebesar Rp. 5.088.240,- dan tidak mengalami perubahan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan, memiliki indikator jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan target 4 laporan pagu sebesar Rp 7.692.480,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini memiliki 2 indikator Persentase persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi dengan target 62.50 % dan persentase potensi usaha yang difasilitasi dengan target 100 %. Adapun kegiatan yang menjadi program ini sbb :

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan ini memiliki sub kegiatan antara lain:
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan indikator jumlah

lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan 9 Lembaga Kemasyarakatan pagu sebesar Rp 4.800.000,- dan tidak mengalami perubahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun dengan target 26 Unit Menjadi 21 Unit dengan pagu Rp 7.700.181.658,- dan setelah perubahan total pagu menjadi Rp. 8.130.447.460,-
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan memiliki indikator Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan dengan target 12 Pokmas/Ormas dengan pagu sebesar Rp 3.568.662.347,- dan setelah perubahan total pagu menjadi Rp. 3.138.396.545,-

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan memiliki sub kegiatan

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan dengan indikator Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan dengan target 26 unit pagu sebesar Rp. 82.251.000,- dan setelah perubahan total pagu menjadi Rp. 98.701.200,-
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan indikator jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan target 12 Laporan pagu sebesar Rp. 15.705.480,- dan tidak mengalami perubahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada Program ini memiliki indikator persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan dengan target 100 %, Kegiatan pada program ini adalah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum dengan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang memiliki indikator Jumlah Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan target 14 lokasi pagu anggaran Rp. 149.066.789,- dan setelah perubahan total pagu menjadi Rp. 162.271.980,-

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki indikator persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan dengan target sebesar 100 %. Pagu sebesar Rp. 24.665.480,- Pada program ini memiliki kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan indikator Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT dengan target sebesar 12 orang dengan anggaran Rp. 8.960.000,- dan tidak mengalami perubahan
- b. Sub kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan dengan indikator Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 12 laporan dengan anggaran Rp. 15.705.480,- dan tidak mengalami perubahan

B. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diuraikan secara detail pada Tabel 3.1 Tentang Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Benowo Tahun 2024 sebelum perubahan dan setelah perubahan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kec. Benowo
Tahun 2024

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.91 %	19,176,699,277	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.91 %	20,585,083,731	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,462,970,968	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	17,474,232,068	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Benowo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	16,462,970,968	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Benowo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	17,474,232,068	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	2,617,598,309	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	3,009,576,576	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Benowo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2,617,598,309	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Benowo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	3,009,576,576	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	96,130,000	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	101,275,087	
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	96,130,000	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	101,275,087	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	30,884,319	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	32,968,719	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45 %		
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	5,192,424	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	5,192,424	
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	5,192,424	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	5,192,424	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	193 lembaga	10,422,000	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	193 lembaga	12,506,400	
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10,422,000	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12,506,400	
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	15,269,895	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	15,269,895	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Benowo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	2,489,175	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Benowo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	2,489,175	
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	5,088,240	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	5,088,240	
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,692,480	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,692,480	
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50 %	11,371,600,485	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50 %	11,388,050,685	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	11,273,644,005	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	11,273,644,005	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Benowo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4,800,000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Benowo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4,800,000	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kandangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,218,247,271	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kandangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,218,247,271	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Romokalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,153,297,978	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Romokalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,583,563,780	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sememi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,226,289,563	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sememi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,226,289,563	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,102,346,846	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,102,346,846	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kandangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	868,028,367	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kandangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	868,028,367	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Romokalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	677,225,802	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Romokalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	246,960,000	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sememi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,313,740,162	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sememi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,313,740,162	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	709,668,016	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	709,668,016	
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	97,956,480	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	114,406,680	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha		
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	82,251,000	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	98,701,200	
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	15,705,480	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	15,705,480	
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	149,066,789	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	162,271,980	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	149,066,789	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	162,271,980	
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	149,066,789	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	162,271,980	
5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	24,665,480	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	24,665,480	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24,665,480	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24,665,480	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Benowo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	8,960,000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Benowo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	8,960,000	
	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai	12 Laporan	15,705,480	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai	12 Laporan	15,705,480	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peraturan Perundang-Undangan		Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			Peraturan Perundang-Undangan		Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Benowo Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Benowo pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024

Perubahan Renja Kecamatan Benowo Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 06 Agustus 2024

Camat Benowo

Kota Surabaya


Dr. DENNY CHRISTUPEL TUPAMAHU
AR., S.H., M.Si, M.H., M.Psi, MM, M.A.P
Pembina Tk. I / IV b
197510281994121001